

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 4, Nomor 1, 2026, P. 513-517
E-ISSN: 2986-6340
Licensed by CC BY-SA 4.0
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18383130>

Tarikat sebagai Kekuatan Politik: Sejarah Keterlibatan Tarikat dalam Politik serta Peran Tarikat

Sufi Orders as a Political Force: The History of Sufi Involvement in Politics and the Role of Sufi Orders

Rian¹, Rahmi Darmis², Hamza Harun³

^{1,2,3}Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Email: risky025@gmail.com¹, rahmi.darmis@uinalauddin.ac.id², hamzahharun62@gmail.com³

Abstrak

Artikel ini membahas dinamika hubungan antara tarikat (tarekat) dan politik dalam sejarah Islam. Tarikat tidak hanya berfungsi sebagai komunitas spiritual, tetapi juga berperan sebagai kekuatan sosial-politik yang signifikan. Dengan menelusuri keterlibatan tarikat dari periode klasik, abad pertengahan, era kolonial, hingga konteks modern, tulisan ini bertujuan menunjukkan bahwa tarikat memiliki peran ganda: sebagai institusi keagamaan dan sebagai agen perubahan sosial-politik. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan historis-sosiologis. Artikel ini menyimpulkan bahwa tarikat memainkan peran penting dalam pembentukan identitas kolektif, resistensi politik, serta mediasi sosial di tengah masyarakat Muslim.

Kata Kunci: *Tarikat, politik Islam, sejarah Islam, gerakan sosial, sufisme, kekuasaan.*

Abstract

This article examines the dynamics of the relationship between tariqa (Sufi orders) and politics in Islamic history. Tariqa have not only functioned as spiritual communities but have also acted as significant socio-political forces. By tracing the involvement of tariqa from the classical period, through the medieval and colonial eras, to the modern context, this article aims to demonstrate that tariqa possess a dual role: as religious institutions and as agents of socio-political change. The method employed is library research with a historical-sociological approach. The article concludes that tariqa have played an important role in shaping collective identity, political resistance, and social mediation within Muslim societies.

Keywords: *Tariqa, Islamic politics, Islamic history, social movements, Sufism, power.*

Article Info

Received date: 10 Januari 2026

Revised date: 15 Januari 2026

Accepted date: 25 Januari 2026

PENDAHULUAN

Tarikat atau tarekat merupakan institusi sufistik yang memiliki struktur, ajaran, dan jaringan sosial yang terorganisir. Dalam sejarah Islam, tarikat sering dipahami sebagai lembaga spiritual yang fokus pada penyucian jiwa dan pembinaan batin. Namun, perkembangan sejarah menunjukkan bahwa tarikat juga memainkan peran penting dalam dinamika sosial-politik umat Islam. Dalam banyak kasus, tarikat menjadi basis perlawanan terhadap kolonialisme, menjadi aktor dalam pembentukan negara, dan kadang menjadi penyeimbang antara kekuasaan dan rakyat.

Keterlibatan tarikat dalam politik bukan fenomena tunggal, melainkan beragam sesuai konteks politik dan geografis. Tulisan ini membahas secara mendalam bagaimana tarikat hadir sebagai kekuatan politik, faktor yang mendorong aktivisme politik mereka, serta peran tarikat dalam kehidupan sosial dan keagamaan.

KERANGKA TEORI

Kajian mengenai hubungan antara tarikat dan politik membutuhkan perangkat teori yang dapat menjelaskan bagaimana otoritas spiritual dapat berubah menjadi kekuatan sosial, dan bagaimana

struktur keagamaan mampu mempengaruhi dinamika negara-bangsa. Kerangka teori berikut digunakan untuk memperdalam analisis dalam artikel ini.

Kajian tentang tarikat dan politik dapat dibedah melalui beberapa pendekatan teoretis, yaitu:

1. Pendekatan Sosiologis Gerakan Sosial

Pendekatan ini memandang tarikat sebagai sebuah *kolektif* yang memiliki kemampuan mobilisasi, struktur kepemimpinan, serta sumber daya simbolik dan material. Tarikat sering memiliki pola rekrutmen yang stabil, jaringan keanggotaan yang tersebar, dan ritual yang memperkuat loyalitas anggota. Melalui modal sosial ini, tarikat dapat bertransformasi menjadi kekuatan politik yang efektif, terutama di tengah masyarakat agraris dan komunitas minoritas Muslim di wilayah kolonial. Di banyak wilayah, gerakan politik berbasis tarikat menghadirkan bentuk resistensi yang sulit ditaklukkan karena keterhubungan emosional dan spiritual para pengikutnya.

Tarikat dapat dipahami sebagai bentuk gerakan sosial tradisional yang memobilisasi massa melalui simbol religi, jaringan ekonomi, dan otoritas spiritual.

2. Teori Kekuasaan Foucault

Menurut Foucault, kekuasaan tersebar dalam jaringan sosial. Tarikat memiliki kapital simbolik dan spiritual yang dapat dikonversi menjadi pengaruh politik.

3. Pendekatan Antropologi Politik

Melihat tarikat sebagai aktor lokal yang membentuk identitas kolektif dan ritus sosial dalam konteks kekuasaan.

Sejarah Keterlibatan Tarikat dalam Politik

Keterlibatan tarikat dalam politik bukan hanya fenomena historis, tetapi sebuah dinamika yang terus mengalami transformasi. Pada setiap periode, bentuk keterlibatan tersebut berbeda-beda, mulai dari pemberian legitimasi moral kepada penguasa, pemberontakan terhadap kolonialisme, hingga partisipasi dalam politik elektoral modern. Bagian ini akan mengelaborasi secara lebih detail setiap fase perkembangan tersebut.

1. Periode Klasik dan Abad Pertengahan

Pada masa ini, sufisme berkembang dari praktik individual menuju bentuk kelembagaan. Hubungan antara tarikat dan politik ditandai oleh interaksi dua arah: penguasa memanfaatkan otoritas spiritual para sufi untuk memperkuat legitimasi mereka, sementara para sufi melihat kekuasaan sebagai sarana untuk menegakkan nilai moral dan keadilan. Di banyak kota Islam, tokoh sufi menjadi mediator antara istana dan rakyat, Banyak ulama sufi berperan sebagai penasihat moral kerajaan, tidak hanya memberikan nasihat, tetapi juga mengkritik kebijakan yang tidak adil. Tarikat seperti Qadiriyyah dan Suhrawardiyah mendirikan ribath dan khanqah yang berfungsi sebagai pusat sosial dan intelektual, sekaligus ruang pembinaan kader. Dalam konteks ini, politik tidak selalu dimaknai sebagai kekuasaan formal, tetapi sebagai tanggung jawab etis yang melekat pada peran sosial ulama sufi. Pada masa awal pertumbuhan sufisme, tarikat belum terbentuk sebagai organisasi formal. Namun, sejak abad ke-10 hingga ke-13, tarikat mulai terstruktur, seperti Qadiriyyah, Syadziliyyah, Suhrawardiyah, dan lain-lain. Pada fase ini, keterlibatan politik berlangsung dalam bentuk nasihat kepada penguasa, penekanan moralitas politik, serta pembentukan institusi sosial.

Contoh keterlibatan: Al-Ghazali menulis *Nasihat al-Muluk* yang berisi kritik moral terhadap penguasa. Syekh Abdul Qadir al-Jailani dihormati sebagai figur moral yang meredam ketegangan sosial. Di era ini, tarikat memiliki pengaruh politik non-formal, yaitu melalui legitimasi moral.

2. Periode Kolonialisme

Pada masa kolonial, tarikat berubah dari lembaga spiritual menjadi kekuatan yang memimpin perlawanan fisik dan ideologis. Transformasi ini terjadi karena kolonialisme mengancam struktur sosial, ekonomi, dan spiritual masyarakat lokal. Tarekat Sanusiyah di Libya menggabungkan jaringan zawiyah dengan strategi militer modern, menjadikannya salah satu gerakan paling terorganisir di Afrika Utara.

Perlawanan Mahdiah di Sudan bukan hanya gerakan militer, tetapi sebuah revolusi teologis yang menolak dominasi budaya Barat. Di Indonesia, perlawanan lokal seperti Perang Aceh, Perang Padri, dan gerakan pemberontakan di Banten banyak melibatkan tokoh-tokoh tarekat yang menggunakan jaringan spiritual sebagai sarana perlawanan. Kolonialisme secara tidak langsung menguatkan posisi tarikat karena rakyat melihat tarikat sebagai representasi identitas keagamaan yang paling murni dan paling independen dari kekuasaan asing. Pada masa kolonialisme Eropa, tarikat memainkan peran paling aktif dalam perlawanan politik. Mereka memobilisasi jaringan spiritual, ekonomi, dan militer.

Contoh penting: Tarekat Sanusiyah di Libya memimpin perlawanan melawan kolonial Italia. Tarekat Mahdiah di Sudan mengobarkan revolusi melawan Inggris dan Turki Utsmani. Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah di Asia Tengah melawan kekuasaan Rusia. Tarekat Syattariyah dan Qadiriyyah di Nusantara berperan dalam Perang Padri (Sumatera Barat). Kekuatan tarikat pada masa kolonial terletak pada kemampuan mereka menyatukan massa, menghubungkan basis-basis lokal, serta menggunakan simbol-simbol keagamaan untuk memotivasi perlawanan.

Tarikat di Era Modern dan Negara Bangsa

Pada masa modern, tarikat tidak lagi berperan sebagai gerakan perlawanan bersenjata, melainkan beradaptasi dengan sistem politik negara-bangsa. Mereka berperan melalui pendidikan, dakwah, organisasi masyarakat, dan bahkan partai politik. Di Indonesia, beberapa tarekat seperti Naqsyabandiyah, Sammaniyah, dan Khalwatiyah membentuk jaringan ulama yang memiliki pengaruh dalam politik lokal, terutama dalam pemilihan kepala daerah. Di Maroko, tarikat dijadikan mitra oleh kerajaan untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Di Turki, pengaruh tarikat seperti Naqsyabandiyah dan Nurcu terlihat dalam gerakan modern yang melahirkan partai-partai Islam yang progresif. Di dunia modern, tarikat juga berperan dalam wacana Islam moderat, rekonsiliasi komunitas, dan penanggulangan radikalisme.

Memasuki abad ke-20 dan 21, peran politik tarikat mengalami transformasi. Tarikat tidak lagi selalu menjadi gerakan revolusi bersenjata, tetapi menjadi aktor sosial-politik yang berperan dalam: Pembentukan partai politik berbasis Islam, Mediasi konflik masyarakat, Pendidikan dan pemberdayaan sosial, Penjaga identitas keagamaan lokal.

Contoh:

Turki : Naqsyabandiyah memiliki pengaruh dalam pembentukan partai-partai Islam modern seperti Refah dan AKP.

Maroko : Raja memanfaatkan tarikat sebagai stabilisator politik.

Indonesia : Tarekat seperti Naqsyabandiyah, Khalwatiyah, dan Syattariyah menjadi bagian dari jaringan ulama yang kadang terhubung secara kultural dengan organisasi besar seperti NU.

Faktor yang Mendorong Keterlibatan Tarikat dalam Politik

Selain dimensi spiritualnya, terdapat berbagai faktor struktural dan sosiologis yang memungkinkan tarekat berkembang sebagai aktor politik yang berpengaruh. Penjelasan berikut memperdalam pemahaman mengenai faktor-faktor yang mendorong keterlibatan tersebut.

Pertama, kekuatan jaringan menjadi modal utama tarekat. Keberadaan muraqabah, zawiyah, serta para khalifah yang tersebar di berbagai wilayah membentuk struktur organisasi yang solid dan efektif, sehingga memungkinkan proses mobilisasi massa berlangsung secara cepat dan terkoordinasi.

Kedua, tarekat memperoleh legitimasi spiritual yang kuat melalui kharisma syekh atau mursyid. Otoritas moral yang melekat pada figur ini kerap melampaui legitimasi kekuasaan politik formal, terutama di mata komunitas pengikutnya.

Ketiga, basis sosial tarekat umumnya berakar pada kelompok masyarakat yang terpinggirkan, seperti komunitas miskin, pedesaan, dan kelompok tertindas. Kondisi ini menjadikan tarekat berpotensi besar menjadi medium artikulasi aspirasi sosial sekaligus basis gerakan protes.

Keempat, adanya tekanan eksternal baik dalam bentuk kolonialisme, penjajahan, maupun otoritarianisme modern sering kali mendorong tarekat bertransformasi menjadi kekuatan resistensi dan memainkan peran sentral dalam gerakan perlawanan.

Peran Tarikat dalam Politik dan Sosial

Dalam ranah politik dan sosial, tarekat memainkan beragam peran strategis yang melampaui fungsi spiritual semata.

Pertama, tarekat kerap tampil sebagai agen perlawanan. Dalam konteks sejarah kolonialisme di Afrika dan Asia, tarekat menjadi kekuatan penting dalam mempertahankan identitas keislaman sekaligus kedaulatan sosial-politik masyarakat Muslim.

Kedua, tarekat berfungsi sebagai mediator dan penjaga harmoni sosial. Melalui jejaring ulama, mursyid, dan tokoh adat, tarekat sering berperan dalam meredam konflik internal serta membangun kohesi sosial di tingkat komunitas.

Ketiga, tarekat berkontribusi sebagai penjaga identitas lokal. Praktik ritual, zikir, dan nilai-nilai sufistik tidak hanya berfungsi sebagai ekspresi spiritual, tetapi juga sebagai modal budaya yang memperkuat jati diri kolektif masyarakat.

Keempat, tarekat menyediakan infrastruktur sosial yang signifikan. Berbagai institusi seperti pesantren, zawiyah, madrasah, rumah singgah, hingga bentuk-bentuk ekonomi mikro menjadi sarana nyata pelayanan sosial yang menopang kehidupan masyarakat.

Kelima, dalam konteks politik modern dan demokratis, tarekat bertransformasi menjadi kekuatan politik yang relevan, antara lain melalui mobilisasi dukungan elektoral, penentuan arah politik lokal, serta penguatan peran masyarakat sipil (*civil society*).

Analisis Kritis

Meskipun tarekat berkembang menjadi aktor politik yang cukup berpengaruh, keterlibatan mereka di ranah kekuasaan tidak lepas dari dinamika yang problematis. Di satu sisi, tarekat mampu menggerakkan basis massa untuk memperjuangkan keadilan sosial, menanamkan nilai-nilai moral dalam praktik politik, serta berperan dalam pelestarian budaya dan spiritualitas masyarakat. Namun, di sisi lain, kehadiran tarekat dalam politik juga menyimpan sejumlah risiko, seperti kecenderungan politisasi agama, penguatan kultus personal terhadap sosok mursyid, serta potensi ketegangan dengan kelompok-kelompok Islam modernis. Dengan demikian, tarekat perlu dipahami sebagai kekuatan politik yang ambivalen—bukan hanya sebagai institusi spiritual, tetapi juga sebagai entitas sosial-politik yang turut membentuk perjalanan sejarah dan peradaban Islam.

SIMPULAN

Kesimpulan utama dari kajian ini menunjukkan bahwa tarikat merupakan entitas sosial-keagamaan yang memiliki fleksibilitas tinggi dalam merespons dinamika sejarah dan politik. Keterlibatan tarikat dalam politik tidak dapat dipahami hanya sebagai penyimpangan dari ajaran spiritual, tetapi justru sebagai manifestasi dari fungsi sosial tarikat dalam menjaga keadilan, moralitas publik, dan stabilitas komunitas. Sepanjang sejarah, tarikat telah memberikan kontribusi dalam memperkuat solidaritas masyarakat, memimpin perlawanan terhadap kekuasaan kolonial, serta menjadi mediator antara penguasa dan rakyat dalam konteks negara-bangsa modern.

Lebih jauh, tarikat menunjukkan kemampuan adaptasi yang kuat. Pada masa klasik, ia menjadi sumber legitimasi moral; pada masa kolonial, ia berubah menjadi kekuatan perlawanan; dan pada era modern, ia berkembang menjadi aktor *civil society* yang turut memengaruhi proses demokratisasi, pendidikan keagamaan, dan rekonsiliasi sosial. Namun demikian, keterlibatan ini juga membawa tantangan seperti risiko politisasi agama, benturan kepentingan, serta konflik internal antar aliran keagamaan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan akademik yang lebih seimbang untuk memahami tarikat sebagai kekuatan spiritual sekaligus politik.

Dengan demikian, tarikat merupakan bagian integral dari sejarah sosial-politik umat Islam. Perannya tidak hanya terbatas pada pembinaan spiritual, tetapi juga mencakup pembentukan struktur sosial, perlawanan terhadap ketidakadilan, serta partisipasi dalam dinamika negara modern. Kajian terhadap tarikat membuka ruang pemahaman yang lebih dalam mengenai bagaimana agama, budaya, dan kekuasaan berinteraksi dalam membentuk peradaban Islam dari masa ke masa.

Dalam konteks modern, keterlibatan tarikat di berbagai negara Islam menunjukkan bahwa mereka tetap relevan sebagai representasi Islam kultural dan sebagai mediator antara negara dan masyarakat. Namun, tantangan baru seperti politisasi agama, gesekan dengan kelompok modernis, serta risiko kultus individu perlu dikelola agar tarikat tetap berada dalam jalur etis dan konstruktif. Secara keseluruhan, tarikat merupakan fenomena sosial-politik yang kompleks, fleksibel, dan terus berevolusi, menjadikannya salah satu pilar penting dalam memahami dinamika politik umat Islam dari masa ke masa.

REFERENSI

- Azra, A. (2013). *Jaringan ulama Nusantara: Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad XVII & XVIII*. Kencana.
- Bruinessen, M. van. (1994). *Tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia*. Mizan.
- Chittick, W. (2000). *Sufism: A beginner's guide*. Oneworld Publications.
- Geertz, C. (1960). *The religion of Java*. University of Chicago Press.
- Hodgson, M. G. S. (1974). *The venture of Islam*. University of Chicago Press.
- Lapidus, I. M. (2002). *A history of Islamic societies*. Cambridge University Press.
- Trimingham, J. S. (1998). *The Sufi orders in Islam*. Oxford University Press.
- Voll, J. O. (1994). *Islam: Continuity and change in the modern world*. Syracuse University Press.